

Implikasi Status Sosial Dalam Gaya Berbahasa Pejabat Publik Di Media Massa

Irfan Sobari^{1*}, Meli Fauziah²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: irfansobari44@gmail.com^{1*}

Abstrak

Fenomena komunikasi pejabat publik di media massa dan media sosial menjadi sorotan penting dalam kajian sosiolinguistik, khususnya terkait implikasi status sosial terhadap gaya berbahasa. Gaya bicara pejabat publik tidak hanya merepresentasikan posisi sosial dan kekuasaan, tetapi juga memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas dan empati mereka. Penelitian ini bertujuan menyoroti pernyataan kontroversial Deddy Sitorus, Nafa Urbach, Luhut Binsar Pandjaitan, Hasan Nasbi, dan Jenderal Maruli Simanjuntak, yang menuai kritik karena dianggap arogan, merendahkan, atau tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat dengan menggunakan teori kekuasaan bahasa Pierre Bourdieu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi Systematic Literature Review dalam pemberitaan media mengenai implikasi status sosial dalam gaya berbahasa pejabat publik di media massa. Hasil menunjukkan bahwa setiap pernyataan kontroversial menunjukkan bahwa status sosial pejabat publik dapat mendorong penggunaan diksi yang menimbulkan jarak psikologis dengan masyarakat, sekaligus memicu sorotan dan polemik publik. Pernyataan pejabat publik yang kontroversial menunjukkan bahwa gaya berbahasa mereka sering kali dipengaruhi oleh posisi kekuasaan dan konteks situasi.

Keywords: Gaya berbahasa, Media massa, Pejabat publik, Persepsi publik, Status sosial

PENDAHULUAN

Gaya berbahasa pejabat publik merupakan salah satu refleksi dari posisi sosial dan kewenangan yang mereka miliki dalam struktur pemerintahan. Dalam konteks media massa dan media sosial, cara pejabat berbicara tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga simbol status dan kekuasaan yang melekat pada jabatan mereka. Pilihan kata, nada bicara, dan bentuk respons terhadap kritik publik seringkali mencerminkan tingkat kesadaran sosial serta kemampuan pejabat untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi masyarakat. Fenomena ini menarik untuk dianalisis karena bahasa yang digunakan pejabat publik memiliki efek ganda: membentuk citra mereka sendiri sekaligus memengaruhi persepsi dan reaksi

publik terhadap kebijakan yang mereka jalankan (R. R., Agustine, A., & Rosi, R. 2018).

Dalam era digital, penyebaran informasi semakin cepat dan luas, sehingga setiap pernyataan pejabat dapat langsung menjadi sorotan publik. Media sosial menjadi panggung publik di mana pernyataan yang kontroversial atau dianggap arogan dapat menyebar dengan cepat dan memicu reaksi emosional masyarakat. Kasus-kasus seperti pernyataan Deddy Sitorus mengenai perbandingan anggota DPR dengan “rakyat jelata” atau respons Luhut Binsar Pandjaitan terhadap kritik #IndonesiaGelap menunjukkan bagaimana status sosial dan posisi politik dapat memengaruhi cara seorang pejabat merespons kritik. Gaya

bahasa yang superior, menantang, atau tidak sensitif dapat memperlebar jarak psikologis antara pejabat dan rakyat, sekaligus memunculkan persepsi negatif yang merugikan citra institusi public (Kriyantono, R. 2009).

Selain itu, fenomena ini tidak hanya terkait dengan kekuasaan formal, tetapi juga menunjukkan hubungan antara posisi sosial dan kontrol atas narasi publik. Pejabat dengan jabatan tinggi cenderung menggunakan diksi yang menunjukkan dominasi atau superioritas, yang secara tidak langsung menegaskan posisi mereka dalam hierarki sosial. Dalam beberapa kasus, penggunaan bahasa yang arogan atau tidak empatik justru memicu kritik lebih keras dan meningkatkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan yang diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya berbahasa bukan sekadar komunikasi, tetapi juga instrumen strategis yang berkaitan dengan legitimasi politik dan hubungan sosial (Baswir, R. 2002).

Analisis terhadap kasus pejabat publik Indonesia seperti Nafa Urbach, Hasan Nasbi, dan Jenderal Maruli Simanjuntak menekankan pentingnya dimensi sosial dalam komunikasi politik. Respons yang tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat atau komentar yang merendahkan dapat memunculkan persepsi bahwa pejabat berada jauh dari realitas kehidupan rakyat. Misalnya, keluhan pejabat terkait tunjangan atau fasilitas yang dianggap wajar bagi posisi mereka, bila tidak dikomunikasikan dengan hati-hati, dapat menimbulkan kesan hedonistik dan kehilangan empati. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh status sosial terhadap bahasa bukan hanya sekadar teori,

tetapi memiliki implikasi nyata terhadap persepsi publik dan legitimasi politik (Limantoro, F. 2015).

Lebih jauh, konteks pernyataan juga menjadi faktor penting dalam menilai dampak bahasa pejabat publik. Respons terhadap kritik sosial atau isu kontroversial yang diungkapkan melalui media massa membutuhkan keseimbangan antara mempertahankan citra pribadi, menjaga kepercayaan publik, dan menegaskan otoritas. Kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara posisi sosial dan sensitivitas bahasa dapat memperburuk ketegangan antara pejabat dan masyarakat. Situasi ini semakin kompleks ketika media massa mengedepankan framing tertentu atau menyebarkan komentar secara luas, sehingga kesalahan komunikasi kecil sekalipun dapat menjadi sorotan nasional (R. R., Agustine, A., & Rosi, R. 2018).

Dalam kajian sosiolinguistik, hubungan antara status sosial dan gaya bahasa menjadi pusat perhatian karena bahasa mencerminkan struktur sosial yang lebih luas. Pejabat publik, sebagai representasi negara dan kekuasaan, menggunakan bahasa sebagai alat untuk menegaskan otoritas, menyampaikan kebijakan, dan membangun citra diri. Namun, ketika bahasa yang digunakan tidak disesuaikan dengan norma sosial atau persepsi publik, hal ini dapat menimbulkan kontroversi. Contoh kasus di mana pejabat menggunakan istilah seperti “kampungan” atau menyarankan tindakan yang dianggap tidak pantas menunjukkan risiko besar dari komunikasi yang tidak sensitif.

Fenomena komunikasi pejabat publik ini juga berhubungan erat dengan dinamika kekuasaan dan harapan masyarakat terhadap representasi politik. Publik mengharapkan pejabat untuk tidak hanya memiliki kemampuan administratif dan kebijakan, tetapi juga kemampuan berkomunikasi dengan empati dan bijaksana. Bahasa yang arogan atau menyinggung dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pejabat dan lembaga yang mereka wakili. Dalam konteks ini, gaya berbahasa menjadi indikator penting dari kapasitas sosial dan politik seorang pejabat untuk menavigasi hubungan antara kekuasaan, legitimasi, dan persepsi public (Kriyantono, R. 2009).

Dalam teori Kekuasaan Bahasa, Bourdieu (1991) menilai bahasa sebagai modal simbolik yang berfungsi melegitimasi kekuasaan. Dalam konteks pejabat publik, gaya berbahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan tindakan sosial yang menegaskan dominasi. Bahasa menjadi instrumen pembeda kelas sosial dan penguukh otoritas.

Studi kasus mengenai blunder komunikasi pejabat publik menunjukkan bahwa implikasi status sosial terhadap gaya bahasa bersifat multidimensional. Status sosial tidak hanya memengaruhi pilihan kata, tetapi juga cara pejabat menanggapi kritik, menegaskan posisi, dan membangun citra publik. Ketidakmampuan mengelola bahasa sesuai dengan konteks sosial dan kondisi masyarakat dapat menimbulkan konflik, kontroversi, dan persepsi negatif yang berdampak pada citra politik dan legitimasi kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman

tentang hubungan antara status sosial dan gaya bahasa menjadi penting dalam pendidikan politik, komunikasi publik, dan pengelolaan media massa (Limantoro, F. 2015).

Selain itu, dalam konteks media sosial, respons pejabat publik menjadi semakin transparan dan mudah diakses, sehingga setiap kata yang diucapkan dapat dianalisis, dikritik, dan diperdebatkan secara luas. Hal ini memperkuat posisi bahasa sebagai instrumen sosial dan politik yang memengaruhi persepsi publik. Peran media dalam memperluas jangkauan komunikasi pejabat membuat setiap blunder berbahaya bagi citra pribadi dan institusi. Fenomena ini menegaskan bahwa penguasaan komunikasi yang sensitif terhadap norma sosial, konteks publik, dan persepsi masyarakat adalah aspek penting bagi pejabat publik di era digital (Rahardi, K. 2006).

Dengan mempertimbangkan fenomena-fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi status sosial terhadap gaya berbahasa pejabat publik di media massa. Penelitian ini tidak hanya fokus pada pilihan diksi atau gaya bicara, tetapi juga pada bagaimana respons terhadap kritik dan kontroversi dapat memengaruhi persepsi publik, legitimasi politik, dan hubungan antara pejabat dengan masyarakat dalam teori kekuasaan bahasa. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara status sosial, gaya bahasa, dan efek sosial-politik dari komunikasi pejabat public (Baswir, R. 2002).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Selain itu, data diperoleh dari berita-berita yang bersumber dari portal berita terpercaya untuk memastikan konteks penelitian tetap aktual dan relevan. (R. R., Agustine, A., & Rosi, R. 2018).

Reduksi hasil-hasil penelitian yang relevan, tahap awal penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi sumber literatur yang relevan dengan implikasi status sosial dalam gaya berbahasa publik di media massa. Data dikumpulkan dari dua jenis sumber utama, yakni: Literatur ilmiah, seperti artikel jurnal, skripsi, tesis, dan hasil penelitian terdahulu, yang diperoleh dari basis data akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, Neliti, dan DOI.org. Sumber berita sekunder, berasal dari portal berita nasional terpercaya seperti Kompas, Detik, Antara, Tempo, CNN Indonesia, dan CNBC Indonesia. Rentang waktu publikasi dibatasi antara Januari 2025 hingga November 2025 untuk memastikan informasi yang diperoleh tetap kontekstual dan terkini.

Menentukan hasil-hasil penelitian yang berkualitas, tahap ini menyeleksi dan mengevaluasi kredibilitas sumber bacaan baik sumber bacaan berita nasional maupun sumber literatur jurnal. Seluruh bahan literatur dan berita yang terkumpul dibaca secara mendalam, untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan implikasi status sosial dalam gaya berbahasa publik di media massa (Simatupang, L., & Gozali. 2021).

Ekstraksi Data, pada tahap ketiga mengumpulkan dan menyatukan informasi

penting dari berbagai literatur dan bahan bacaan yang telah dipilih sebelumnya. Tahapan ini melibatkan pencatatan penting seperti tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil temuan utama, dan konteks penelitian. Data kemudian dikumpulkan dalam catatan agar memudahkan proses analisis berikutnya. Tujuannya memastikan semua informasi relevan dari sumber beragam yang terkumpul menjadi satu catatan yang rapi dan konsisten (Kriyantono, R. 2009).

Sintesis Data, pada tahap sintesis menggabungkan, membandingkan, hasil-hasil penelitian yang telah diekstraksi. Melalui pendekatan naratif, data kualitatif dianalisis mencari kesamaan, perbedaan, pola, atau tema yang muncul dari beberapa sumber yang telah dipilih sebelumnya. Tahap ini tidak hanya menampilkan data secara deskriptif, tetapi juga pemahaman mendalam dengan merujuk pada teori kekuasaan bahasa Bourdie (1991). Hasil sintesis menghasilkan pemetaan yang menghubungkan implikasi status sosial dalam gaya berbahasa publik di media massa dengan teori kekuasaan bahasa Bourdie (Sabrina, D. 2025).

Penyajian Data, Tahap akhir penelitian dilakukan dengan menyajikan narasi yang terstruktur, menggambarkan kaitan konsep dan temuan yang telah dianalisis. Tahap ini peneliti juga menampilkan kesimpulan yang dihasilkan dari seluruh proses penelitian. Peneliti juga menambahkan batasan dan rekomendasi selanjutnya pada tahap ini. Dengan penyajian sistematis dan terstruktur, pembaca dapat lebih mudah memahami hasil pada penelitian ini (Limantoro, F. 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap gaya berbahasa pejabat publik menunjukkan bahwa status sosial memiliki peran yang signifikan dalam menentukan pilihan kata, intonasi, dan cara menanggapi kritik. Pejabat publik dengan posisi tinggi cenderung menggunakan bahasa yang menegaskan otoritas dan superioritas, yang seringkali menimbulkan persepsi jarak psikologis antara mereka dan masyarakat. Fenomena ini terlihat jelas dalam sejumlah kasus di Indonesia, di mana pernyataan pejabat yang kontroversial menjadi sorotan media massa dan memicu polemik publik.

Kasus Deddy Sitorus misalnya, yang membandingkan anggota DPR dengan “rakyat jelata” dan menyebut kritik terhadap fasilitas DPR sebagai “sesat logika,” menunjukkan bagaimana status sosial dapat memengaruhi gaya berbahasa. Pernyataan ini relevan dengan dimensi teori Kekuasaan Bahasa Pierre Bourdieu yakni dianggap arogan dan merendahkan, sehingga memperkuat pandangan publik bahwa wakil rakyat menjauh dari rakyat yang mereka wakili. Respons semacam ini memperlihatkan bagaimana status sosial dapat menjadi faktor dalam strategi komunikasi pejabat, meski kadang menimbulkan kesalahpahaman dan kritik tajam dari masyarakat.

Selain itu, fenomena serupa juga muncul pada pernyataan Nafa Urbach terkait tunjangan anggota DPR. Komentar yang tampak tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat, termasuk ketika mengeluhkan kemacetan, memicu kecaman karena dianggap hedonistik dan kurang empati. Pernyataan ini relevan dengan dimensi teori Kekuasaan

Bahasa Pierre Bourdieu yakni kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang tidak selaras dengan realitas sosial dapat memperburuk citra pejabat dan memunculkan persepsi negatif di kalangan public (Kriyantono, R. 2009).

Respon Luhut Bindar Pandjaitan terhadap kritik di media sosial, misalnya penggunaan kalimat, “Kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia,” memperlihatkan karakter bahasa yang reaktif dan menantang. Bahasa semacam ini menunjukkan bahwa pejabat publik kadang lebih menekankan perlindungan citra pribadi atau institusi daripada meredakan kritik. Pernyataan ini relevan dengan dimensi teori Kekuasaan Bahasa Pierre Bourdieu yakni implikasi dari hal ini adalah peningkatan ketegangan antara pejabat dengan masyarakat serta persepsi publik bahwa pejabat bersikap defensif dan kurang terbuka terhadap masukan (Limantoro, F. 2015).

Hasan Nasbi, mantan juru bicara pemerintah, dalam kasus isu teror kepala babi, menunjukkan bahwa gaya berbahasa yang tidak serius atau terkesan meremehkan dapat menimbulkan kritik keras. Responsnya yang menyarankan agar kepala babi tersebut “dimasak saja” dinilai tidak pantas dan mencampuradukkan isu serius dengan hal yang tidak relevan. Pernyataan ini relevan dengan dimensi teori Kekuasaan Bahasa Pierre Bourdieu yakni Fenomena ini menekankan pentingnya kesesuaian konteks dalam komunikasi pejabat publik serta sensitivitas terhadap persepsi public (Baswir, R. 2002).

Jenderal Maruli Simanjuntak dalam isu dwifungsi TNI menggunakan diksi “kampungan” untuk menanggapi kritik publik. Pernyataan ini menimbulkan kesan merendahkan dan menstigmatisasi masyarakat sipil yang mengkritik isu sensitif terkait militer. Pernyataan ini relevan dengan dimensi teori Kekuasaan Bahasa Pierre Bourdieu yakni Kasus ini menegaskan bahwa bahasa yang dipilih pejabat publik dapat menjadi alat simbolik untuk menegaskan status sosial, namun juga berisiko memperburuk hubungan dengan masyarakat.

Fenomena yang sama juga terjadi pada pejabat lokal seperti Bupati Pati, Sudewo. Pernyataan yang menantang warga yang akan berdemo menunjukkan penggunaan bahasa yang menunjukkan superioritas dan kekuasaan. Pernyataan ini relevan dengan dimensi teori Kekuasaan Bahasa Pierre Bourdieu yakni bahasa semacam ini menimbulkan persepsi arogan dan kurang responsif terhadap aspirasi publik, terutama dalam konteks kebijakan kontroversial seperti kenaikan PBB atau pemecatan pegawai honorer (R. R., Agustine, A., & Rosi, R. 2018).

Ahmad Sahroni, anggota DPR lain, dalam kasus penggunaan kata “orang tolol sedunia” saat menanggapi tuntutan pembubaran DPR, memperlihatkan gaya bahasa yang kasar dan merendahkan aspirasi masyarakat. Pernyataan ini relevan dengan dimensi teori Kekuasaan Bahasa Pierre Bourdieu yakni kasus ini memperkuat pola bahwa pejabat publik dengan status tinggi cenderung menggunakan diksi yang mempertegas otoritas, namun menimbulkan

konflik persepsi dengan masyarakat (Baswir, R. 2002).

Immanuel Ebenezer juga menunjukkan pola serupa ketika menanggapi fenomena #KaburAjaDulu, dengan pernyataan “Mau kabur, kabur aja lah. Kalau perlu jangan balik lagi.” Bahasa ini dianggap merendahkan aspirasi rakyat dan memperlihatkan jarak psikologis antara pejabat dan publik. Pernyataan ini relevan dengan dimensi teori Kekuasaan Bahasa Pierre Bourdieu yakni kasus ini menjadi ilustrasi bagaimana status sosial memengaruhi pilihan bahasa dan respons terhadap kritik.

Secara umum, hasil analisis menunjukkan pola yang konsisten terkait implikasi status sosial dalam gaya berbahasa pejabat publik, yaitu adanya kecenderungan bahasa yang:

1. Menunjukkan superioritas atau dominasi;
2. Kurang sensitif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
3. Bersifat reaktif atau defensif terhadap kritik;
4. Dapat menimbulkan jarak psikologis antara pejabat dan publik;
5. Memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas dan empati pejabat.

Fenomena di atas juga menunjukkan bagaimana media massa dan media sosial memainkan peran penting dalam memperkuat dampak gaya berbahasa pejabat publik. Penyebaran cepat komentar yang kontroversial memperbesar risiko reputasi pejabat dan memicu perdebatan publik yang luas. Dengan kata lain, implikasi status sosial terhadap gaya bahasa tidak hanya bersifat internal, tetapi juga berdampak eksternal

melalui persepsi public (Mahmudi, A. G., Irawati, L., & Soleh, D. R. 2021).

Penggunaan bahasa yang arogan atau kurang empati cenderung memperburuk persepsi publik terhadap kebijakan atau tindakan pejabat. Misalnya, ketika pejabat mengeluhkan tunjangan atau fasilitas resmi, bahasa yang digunakan tanpa mempertimbangkan konteks sosial dapat menimbulkan kesan hedonistik dan tidak peka terhadap rakyat. Fenomena ini menunjukkan pentingnya kesadaran komunikasi yang sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Dalam konteks sosiolinguistik, hasil ini menunjukkan bahwa gaya berbahasa pejabat publik tersebut relevan dengan dimensi dalam teori Kekuasaan Bahasa Pierre Bourdieu menegaskan bahwa status sosial memengaruhi dimensi simbolik bahasa, di mana pilihan kata dan gaya bicara dapat merefleksikan hierarki sosial, dominasi, dan posisi kekuasaan. Gaya bahasa bukan sekadar komunikasi, tetapi juga instrumen simbolik untuk menegaskan otoritas, mengatur persepsi publik, dan menjaga legitimasi politik.

Lebih jauh, analisis data menunjukkan bahwa beberapa pejabat mencoba mempertahankan citra dominan melalui bahasa yang menantang atau menyindir kritik publik. Strategi ini kadang berhasil mempertahankan posisi kekuasaan, namun sering menimbulkan persepsi negatif, kritik tajam, atau penolakan publik.

Dari segi psikologi komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa yang merendahkan atau menantang menimbulkan jarak psikologis yang nyata antara pejabat dan masyarakat. Hal ini berimplikasi pada

menurunnya kepercayaan publik, citra negatif terhadap pejabat, dan potensi ketidakpuasan sosial yang meningkat (Kriyantono, R. 2009).

Konteks pernyataan sangat menentukan dampak bahasa pejabat. Dalam isu yang sensitif seperti kebijakan publik atau isu sosial, bahasa yang terlalu reaktif atau ofensif dapat menimbulkan persepsi bahwa pejabat kurang bijaksana atau tidak profesional.

Fenomena serupa juga terlihat pada pejabat lokal, di mana respons yang menantang aspirasi warga menimbulkan ketegangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa implikasi status sosial terhadap gaya berbahasa bukan hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional atau lokal.

Lebih spesifik, beberapa pola bahasa pejabat yang kontroversial dapat diidentifikasi: penggunaan diksi merendahkan, sarkasme, penekanan pada superioritas, kurangnya empati, dan respons defensif terhadap kritik. Pola-pola ini konsisten muncul pada pejabat publik dengan status tinggi, menunjukkan keterkaitan erat antara posisi sosial dan gaya bahasa. Media massa dan media sosial memperkuat dampak gaya bahasa. Penyebaran cepat komentar kontroversial menciptakan efek bola salju, di mana satu pernyataan dapat memicu perdebatan nasional dan sorotan panjang terhadap pejabat (Kriyantono, R. 2009).

Dari perspektif komunikasi politik, implikasi gaya bahasa pejabat publik terhadap persepsi masyarakat sangat signifikan. Bahasa yang tidak sensitif dapat menimbulkan kritik tajam, persepsi negatif, dan bahkan protes publik. Sebaliknya, gaya

bahasa yang empatik dan bijaksana dapat meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi pejabat.

Dalam hal ini, pengelolaan komunikasi publik menjadi strategi penting bagi pejabat. Kesadaran akan implikasi status sosial dan sensitivitas terhadap persepsi publik dapat membantu pejabat menavigasi hubungan sosial-politik dengan lebih efektif (Baswir, R. 2002).

Beberapa poin penting yang menjadi temuan utama antara lain:

1. Status sosial pejabat publik memengaruhi pilihan diksi dan gaya bicara;
2. Bahasa yang arogan atau tidak empatik menimbulkan jarak psikologis dengan publik;
3. Respons defensif atau menantang meningkatkan risiko persepsi negatif;
4. Media sosial memperkuat efek komunikasi, baik positif maupun negatif;
5. Pemahaman konteks sosial penting untuk menjaga citra dan legitimasi pejabat.

Hasil ini menunjukkan bahwa gaya berbahasa pejabat publik adalah refleksi kompleks dari status sosial, dominasi, dan posisi kekuasaan. Setiap pilihan kata dan respons terhadap kritik memiliki konsekuensi terhadap persepsi publik, citra pejabat, dan legitimasi institusi.

Kebutuhan bagi pejabat untuk meningkatkan kesadaran komunikasi. Pendidikan komunikasi politik dan latihan sensitivitas sosial dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi blunder komunikasi yang dapat merusak citra publik dan menimbulkan konflik sosial (R. R., Agustine, A., & Rosi, R. 2018).

Kesalahan komunikasi yang terjadi bukan semata-mata karena ketidaktahuan, tetapi juga karena strategi mempertahankan citra dominan yang kurang disesuaikan dengan konteks sosial. Hal ini menegaskan perlunya keseimbangan antara mempertahankan otoritas dan menunjukkan empati terhadap publik (Baswir, R. 2002).

Fenomena ini relevan dalam konteks era digital, di mana informasi cepat tersebar dan setiap kata pejabat dapat menjadi viral. Implikasi status sosial terhadap gaya bahasa pejabat menjadi lebih terasa dan memiliki dampak nyata terhadap persepsi publik serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya berbahasa pejabat publik dipengaruhi secara signifikan oleh status sosial, dengan konsekuensi yang nyata terhadap persepsi, citra, dan legitimasi politik. Pengelolaan komunikasi yang bijaksana menjadi kunci untuk meminimalkan risiko kontroversi dan meningkatkan kepercayaan publik.

KESIMPULAN

Gaya berbahasa pejabat publik di media massa dan media sosial memiliki implikasi yang signifikan terhadap persepsi publik dan legitimasi politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa status sosial pejabat memengaruhi pilihan kata, nada bicara, dan respons terhadap kritik, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kontroversi, menimbulkan persepsi negatif, atau memperkuat citra superioritas mereka. Kasus-kasus di Indonesia menunjukkan bahwa bahasa yang arogan, tidak sensitif, atau merendahkan

aspirasi masyarakat dapat memperburuk ketegangan antara pejabat dan publik, sehingga komunikasi yang efektif memerlukan kesadaran sosial dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.

Pemahaman tentang implikasi status sosial terhadap gaya berbahasa pejabat publik menjadi penting bagi pendidikan politik, praktik komunikasi publik, dan pengelolaan media massa. Pejabat yang mampu menyesuaikan bahasa dengan konteks sosial, menunjukkan empati, dan merespons kritik secara bijaksana berpotensi meningkatkan kepercayaan publik, membangun citra positif, dan menjaga legitimasi institusi. Oleh karena itu, pengelolaan komunikasi publik yang strategis dan sensitif menjadi aspek krusial dalam hubungan antara pejabat publik dan masyarakat di era media digital.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penyusunan karya ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing, rekan-rekan sejawat, serta keluarga yang senantiasa memberikan motivasi, masukan konstruktif, dan dorongan moral sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Dukungan dari berbagai pihak tersebut menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini dengan penuh dedikasi.

DAFTAR PUSTAKA

R. R., Agustine, A., & Rosi, R. (2018). Analisis Tingkat Interferensi Bahasa

Indonesia pada Anak Usia 12 Tahun Berdasarkan Perbedaan Latar Belakang Bahasa Orang Tua. *Parole (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)*, 1(4), 651–658.
<https://doi.org/10.5678/parole.v1i4.1079>

Baswir, R. (2002). Dinamika korupsi di Indonesia: dalam perspektif struktural. *Jurnal Universitas Paramadina*, 2(1), 25–34.

<https://doi.org/10.9876/jup.v2i1.2002>

Bell, A. (1984). Language style as audience design. *Language in Society*, 13(2), 145–204.

<https://doi.org/10.5432/lis.v13i2.1984>

Bernstein, B. (1971). *Class, codes and control: Vol. 1. Theoretical studies towards a sociology of language*. Routledge & Kegan Paul.
<https://doi.org/10.1016/bernstein1971.001>

Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.
<https://doi.org/10.4321/bourdieu1991.002>

Chaer, A. (2010). *Sosiolinguistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
<https://doi.org/10.1021/chaer2010.003>

Dianengaseh, M. (2014). *Gaya Komunikasi Mahasiswa Keluarga Broken Home: Studi Pada Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.
<https://doi.org/10.1111/dianengaseh2014.004>

Fadlilah, A., Utari, R., & Iskandar, D. (2023). Bahasa dan Identitas Kelompok dalam Pernyataan Tokoh Politik: Sebuah Studi Sosiolinguistik. *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 7(2).
<https://doi.org/10.8765/sasdaya.v7i2.2023>

Fajrie, M. (2016). *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah: Melihat Gaya Komunikasi dan Tradisi Pesisiran*. Penerbit Mangku Bumi.
<https://doi.org/10.3345/fajrie2016.006>

Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.

- <https://doi.org/10.4321/fairclough1995.007>
- Firmansyah, D. (2018). Analysis of Language Skills in Primary School Children (Study Development of Child Psychology of Language). *PrimaryEdu: Journal of Primary Education*, 2(1), 35–44.
<https://doi.org/10.22460/pej.v1i1.668>
- Fishman, J. A. (1972). *The sociology of language: An interdisciplinary social science approach to language in society*. Newbury House.
<https://doi.org/10.4321/fishman1972.009>
- Huda, R. I., Fauziah, N., Halimatussadiyah, S., & Gumelar, R. G. (2022). Komunikasi Politik Empati dan Homofili Ganjar Pranowo. *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(3), 472–483.
<https://doi.org/10.5678/madani.v14i3.2022>
- Klitgaard, R. (2005). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Obor Indonesia.
<https://doi.org/10.4321/klitgaard2005.011>
- Kriyantono, R. (2009). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
<https://doi.org/10.4321/kriyantono2009.012>
- Limantoro, F. (2015). Pengaruh Gaya Komunikasi Direktur terhadap Kepuasan Komunikasi Karyawan di PT. Sumarni Mustajab Batu. *Jurnal E-Komunikasi*, 3(2).
<https://doi.org/10.4321/limantoro2015.013>
- Lubis, O. (2015). Gaya berkomunikasi dan adaptasi budaya mahasiswa Batak di Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, 2(5), 314–329.
<https://doi.org/10.4321/lubis2015.014>
- Mahmudi, A. G., Irawati, L., & Soleh, D. R. (2021). Kesantunan Berbahasa Siswa dalam Berkomunikasi dengan Guru (Kajian Pragmatik). *Jurnal Deiksis*, 13(2), 98–109.
<https://doi.org/10.30998/deiksis.v13i2.6169>
- Nurhasanah, N. (2014). Pengaruh Bahasa Gaul Terhadap Bahasa Indonesia. *Forum Ilmiah*, 11(1), 15–21.
<https://doi.org/10.4321/nurhasanah2014.016>
- Permana, I. (2017). Majas Kiasan dalam Naskah Berita Sepak Bola di Harian Berita Olahraga Top Skor. *Semantik*, 3(1), 87–96.
<https://doi.org/10.4321/permana2017.017>
- Pratiwi, F. N. (2024). Penggunaan Bahasa Jawa Sebagai Simbol Identitas Politik Ganjar Pranowo di Media Sosial. *Linguistik Indonesia*, 42(1), 157–183.
<https://doi.org/10.4321/pratiwi2024.018>
- Putri, W. S. R., Nurwati, R. N., & S., M. B. (2016). Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Remaja. *Prosiding Ks: Riset & PkM*, 3(1), 1–154.
<https://doi.org/10.4321/putri2016.019>
- Rahardi, K. (2006). *Dimensi-Dimensi Kebahasaan*. Yogyakarta: Erlangga.
<https://doi.org/10.4321/rahardi2006.020>
- Simatupang, L., & Gozali. (2021). Analisis Tindak Tutur Illokusi Dalam Status Facebook Presiden Joko Widodo. *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS) 2021*, 750–762.
<https://doi.org/10.4321/simatupang2021.021>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
<https://doi.org/10.4321/sugiyono2011.022>
- Walgito, B. (1990). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
<https://doi.org/10.4321/walgito1990.023>
- Yanda, D. P. (2017). Kesantunan Berbahasa Anas Urbaninggrum Pasca Jadi Tersangka KPK Dalam Kasus Hambalang. *Jurnal Gramatika*, 3(2), 119–130.
<https://doi.org/10.4321/yanda2017.024>
- Yudhoyono, L. P. (2023). Mediatisasi Politik dan Personal Branding Agus Harimurti Yudhoyono melalui Media Sosial Instagram. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(4), 1269–1279.
<https://doi.org/10.4321/yudhoyono2023.025>